

*Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)
BPK RI Perwakilan Provinsi Papua
Barat
Tahun 2020*



Integritas – Independensi - Profesionalisme

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT	8
BAB IV PENUTUP	17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat menyusun dan menyampaikan Laporan atas Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan rencana strategis (renstra) BPK RI –yaitu Renstra 2016-2020.

Renstra BPK RI periode 2016-2020 telah ditetapkan untuk memberikan arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK. Penerapan renstra telah dilengkapi dengan sistem manajemen kinerja BPK (SIMAK) yang merupakan instrument yang mampu menterjemahkan strategi ke dalam level operasional melalui indikator kinerja utama (IKU), inisiatif strategis level BPK dan satker, serta fasilitas *scorecard* yang berfungsi untuk mengukur dan memonitor pencapaian target kinerja level BPK-Wide maupun level satker.

Melalui penyusunan renstra, BPK berkomitmen untuk melaksanakan prioritas yang penting terkait dengan misi BPK dan sekaligus responsif dengan lingkungannya. BPK juga menyadari bahwa tanpa suatu aktivitas untuk mengelola kinerja organisasi, eksekusi rencana strategis umumnya akan berakhir dengan kegagalan. Hal tersebut yang mendasari BPK-sejak tahun 2008 menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *scorecard* yang didesain untuk menterjemahkan renstra ke dalam sasaran- sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja (satker) pelaksana BPK.

Sistem manajemen kinerja (SIMAK) BPK juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas-prioritas satker pelaksana dengan prioritas Badan. Komponen dalam SIMAK BPK yang terdiri dari peta strategi, *scorecard*, indikator kinerja utama, dan *dashboard view* dirasakan telah cukup lengkap untuk mengejawantahkan sasaran strategis BPK ke dalam sasaran dan target pelaksana. Dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia, SIMAK BPK memungkinkan BPK untuk tidak hanya melakukan monitoring atas pencapaian tahun lalu/historis, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di BPK, penyebabnya, serta opsi-opsi yang tersedia untuk mengambil kebijakan terkait perubahan dan tantangan tersebut.

Secara garis besar, capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk tahun 2020, adalah sebesar 94.43%. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik, meski beberapa IKU masih belum tercapai, seperti Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang hanya mencapai target 83,93% dari target sebesar 100%, persentase penyelesaian TLRHP yang hanya mencapai 68,62% dari target sebesar 75%, indeks pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK yang hanya mencapai 4,51 dari target sebesar 5,00, persentasi tingkat penerapan manajemen pengetahuan hanya mencapai 25% dari target 100%, persentase tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi hanya mencapai 3,71 dari target sebesar 3,80, dan persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial hanya mencapai 94,57% dari target 100%. Namun, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat pada beberapa target IKU mampu menghasilkan realisasi diatas target yang telah ditentukan, diantaranya: Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 100,78% dari target 100%, Hasil Evaluasi AKIP yang mencapai 87,04 dari target 86,00, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi yang mencapai 99,55% dibandingkan dengan target sebesar

95%, dan Tingkat Kinerja Anggaran yang mencapai 90,88% dibandingkan dengan target sebesar 87%. Sedangkan untuk beberapa target IKU lainnya telah mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian diatas, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat masih perlu memberikan perhatian terhadap beberapa hal penting antara lain Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, rekomendasi yang ditindaklanjuti, pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK, Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dan persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan. Pencapaian hal tersebut memerlukan kerja keras dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Pada akhirnya, tugas BPK sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional. Di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan terus meningkatkan perannya menjadi pelopor keteladanan (*leading by example*) dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Manokwari, Januari 2021

Kepala Perwakilan,

**Arjuna Sakir
NIP. 196806081998031006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Papua Barat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK mendirikan kantor perwakilan di tiap provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi. BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu unit kerjanya adalah BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama VI). BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melakukan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki 14 entitas pemeriksaan pemerintah daerah (1 pemerintah provinsi, 1 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten).



Gambar 1-1 Peta Wilayah Kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Pada gambar di atas terlihat bahwa, wilayah kerja (pemeriksaan) BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dari sisi transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya karena kondisi geografis yang meliputi jajaran kepulauan dan pegunungan dalam wilayah provinsi Papua Barat. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi tekad BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk menjalankan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana aksi perwakilan, menyusun program pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta kegiatan-kegiatan lain terkait pemeriksaan seperti pemberian penjelasan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dll.

C. Struktur Organisasi Perwakilan Papua Barat

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan membawahi tiga unit kerja sebagai berikut:

1. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai Tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Sekretariat Perwakilan Provinsi Papua Barat terdiri dari 5 (lima) subbagian, yaitu: Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan,

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum, dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Sub Auditorat Papua Barat I

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

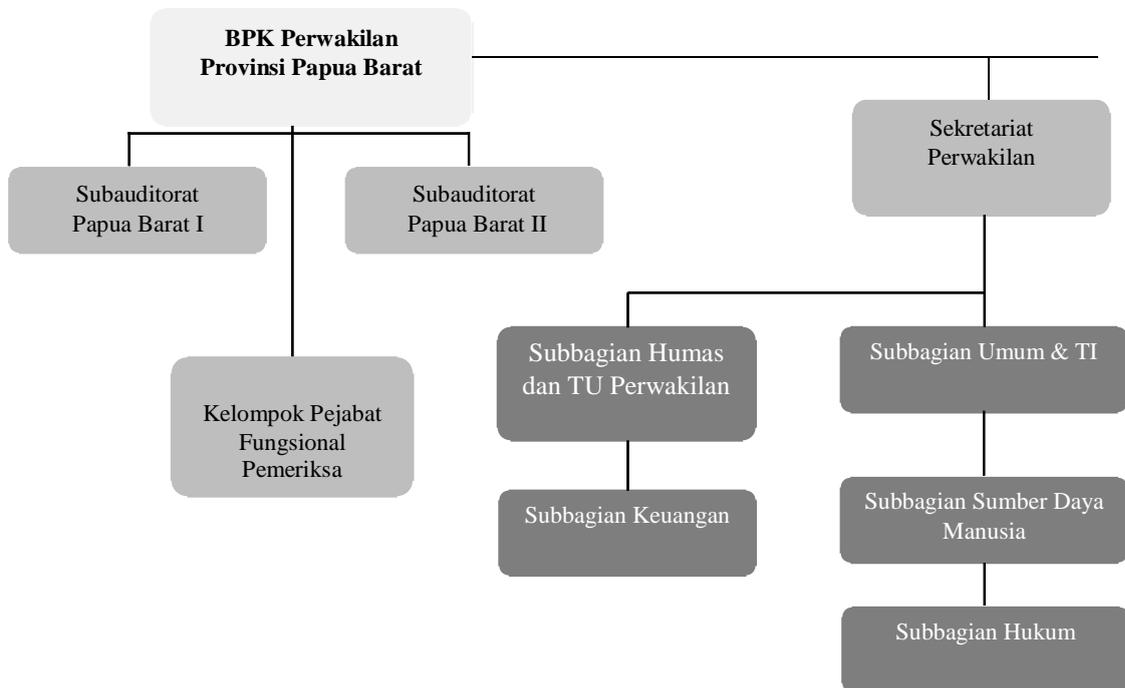
3. Sub Auditorat Papua Barat II

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Terdiri dari para, Pengendali Teknis (PT), Ketua Tim (KT), dan Anggota Tim (AT) yang bertugas melakukan pemeriksaan serta kegiatan lain terkait pemeriksaan.

Secara ringkas, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat disajikan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1-2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

D. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat per triwulan keempat tahun 2020 berjumlah 67 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat, 2 orang Kepala Sub

Auditorat, 5 orang Kepala Sub Bagian, 58 orang pemeriksa, dan 15 orang staf penunjang.

Total Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk Tahun 2020 sebesar Rp23.930.274.000,00 dan terdiri dari satu DIPA, yaitu Nomor SP DIPA-004.01.2.445299/2020

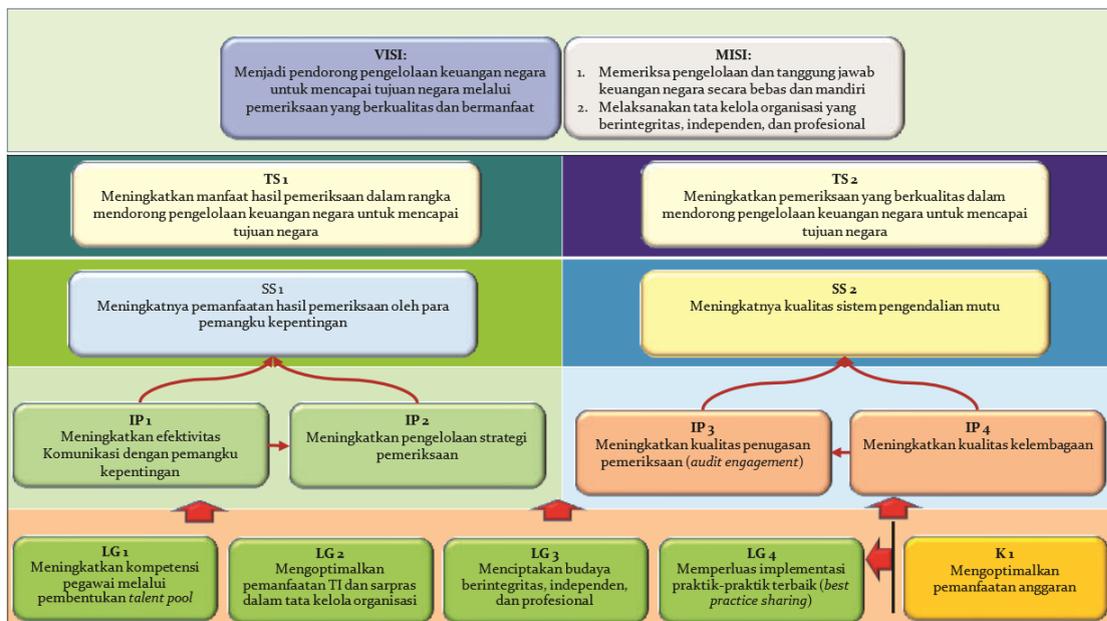
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) PERWAKILAN PAPUA BARAT

A. Perencanaan Strategis Perwakilan Papua Barat

Renstra BPK RI 2016-2020 menetapkan visi BPK “menjadi Pendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara Melalui Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat”. Visi tersebut dijabarkan kedalam misi 1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri; dan 2) melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Sementara tujuan strategis yang ingin dicapai adalah

1) meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara; dan 2) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara.

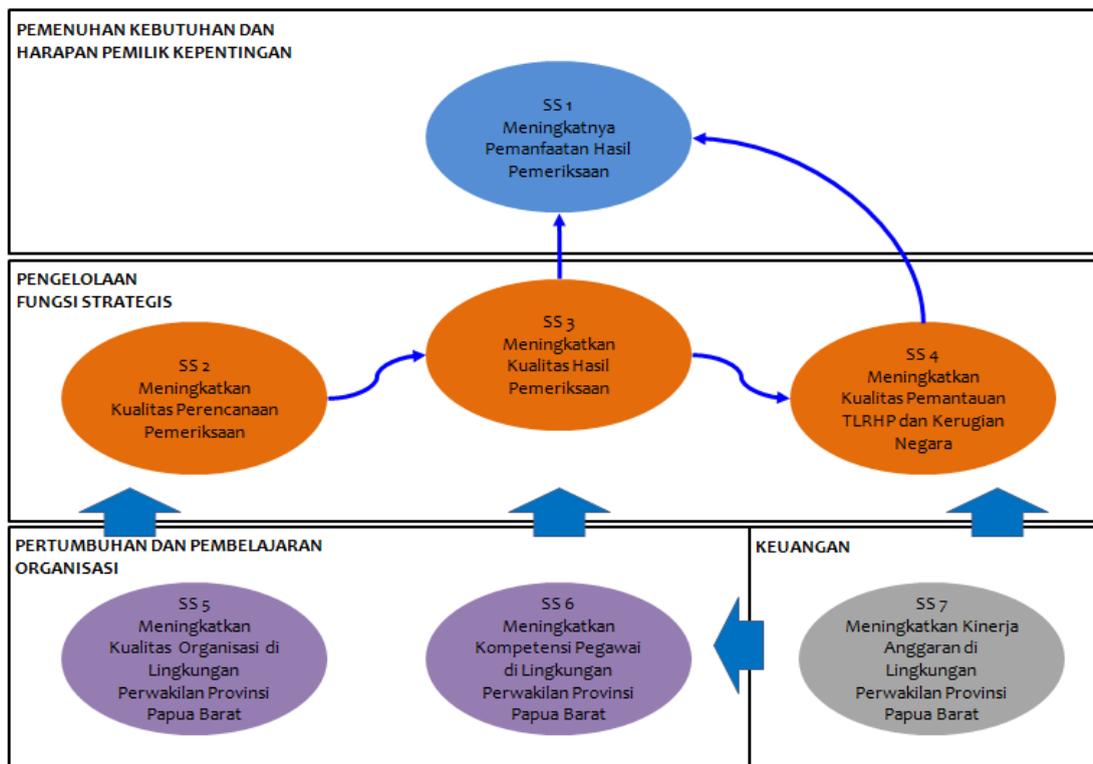
Untuk mencapai hal tersebut, BPK telah menetapkan 2 Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide sebagai berikut.



Gambar 2-1 Peta Strategi BPK-Wide 2016 – 2020

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bermutu untuk memenuhi harapan pemilik kepentingan. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan fungsi yang salah satunya merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK 2016 – 2020. Sasaran strategis akhir “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku

Kepentingan” tersebut, oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat diturunkan menjadi 6 strategi satuan kerja lainnya, yang dapat divisualisasikan dalam gambar peta strategis satker berikut ini, termasuk pola keterkaitan antar strategi.



Gambar 2-2 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020

Strategi-strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya sasaran, tujuan, misi, dan visi BPK. Dengan meningkatkan kinerja anggarannya (SS 7), BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengharapkan dapat meningkatkan kualitas organisasi (SS 5), dan kompetensi pegawai (SS 6) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Peningkatan kinerja anggaran, kualitas organisasi, serta kompetensi pegawai bersama-sama sebagai sebuah pertumbuhan dan pembelajaran organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan berdampak pada upaya pengelolaan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan (SS 2) dan upaya kualitas hasil pemeriksaan (SS 3) serta untuk meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun penyelesaian Kerugian Negara (SS 4). Pada akhirnya BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berharap, dengan meningkatkan pertumbuhan dan pembelajaran organisasi serta pengelolaan fungsi strategis maka BPK dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemeliki kepentingan, yang tercermin dari meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK (SS 1).

B. Perjanjian Kinerja TA 2020 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat dan Auditor Utama Keuangan Negara VI Tahun 2020 selaku atasan langsung Kepala Perwakilan.

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tahun 2020:

Tabel 2-1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
<p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%

Dibandingkan dengan IKU tahun 2019, IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengalami sedikit perubahan. Perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya penyempurnan manual IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja Perwakilan oleh BPK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT)

A. Pencapaian Skor Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Dengan fungsi tersebut maka Perwakilan Provinsi Papua Barat wajib mengukur tingkat pencapaian tiap tahunnya. Pada tahun 2020 Perwakilan Provinsi Papua Barat mendapat pencapaian skor kinerja sebesar 94,43% atau mengalami penurunan sebesar 3,08% dari tahun 2019 yang mencapai 97,51%.

Berikut adalah *highlight* capaian Skor Kinerja secara keseluruhan untuk BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat selama lima tahun terakhir dan capaian detil IKU lainnya yang perlu mendapat perhatian perwakilan.

Tabel 3-1 Highlight Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Lima Tahun Terakhir

Urai	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	94,43	97,51	92,87	91,81	96,67	87,40

Tabel 3-2 Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020
Indikator Kinerja Utama Target 2020 Capaian 2020

<i>IKU 1</i>	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83.93%
<i>IKU 2</i>	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
<i>IKU 3</i>	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100%	68.62%
<i>IKU 4</i>	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100.78%
<i>IKU 5</i>	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%
<i>IKU 6</i>	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%
<i>IKU 7</i>	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5.00)	4.51
<i>IKU 8</i>	Hasil Evaluasi AKIP	A (86.00)	87.04
<i>IKU 9</i>	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99.55%
<i>IKU 10</i>	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%

<i>IKU 11</i>	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3.71
<i>IKU 12</i>	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	94.57%
<i>IKU 13</i>	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	90.88%

Secara umum, capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat selama tahun 2020 tidak dapat mencapai target sebesar 100. Namun dari 13 IKU yang menjadi target, sebanyak 4 IKU mampu memperoleh skor diatas 100 karena berhasil melebihi target yang ditentukan sementara 3 IKU berhasil memenuhi target yang ditentukan sehingga mendapat skor 100. Dari 13 IKU yang harus dipenuhi, ada 6 IKU yang memiliki capaian di bawah target.

Evaluasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat atas capaian tersebut menunjukkan bahwa penyebab tidak tercapainya target dari beberapa IKU disebabkan karena beberapa faktor yang berasal dari eksternal dan internal BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Kendala yang dihadapi dan rencana aksi peningkatan kinerja yang akan dijalankan ke depannya adalah sebagai berikut:

Strategi 1 Meningkatkan Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Belum tercapainya IKU 1 yaitu Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang memiliki target 100%. Pada realisasinya, pencapaian Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Triwulan IV 2020 baru mencapai 83.93%, hal ini dikarenakan belum terdapat hasil evaluasi yang dikeluarkan EPP atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit pada Semester II 2020.

Strategi 2 Meningkatkan Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Pencapaian IKU 2 yaitu Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan selama Tahun 2020 telah mencapai 100%, hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkannya beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yakni LHP LKPD, LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD dan LHP atas pemeriksaan kinerja dan DTT sehingga IKU ini telah mencapai target 100%. Capaian ini tentunya menjadi kebanggaan bagi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dimana dengan keterbatasan jumlah tenaga pemeriksa dan keterbatasan waktu yang dimiliki, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Strategi 3 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Belum tercapainya IKU 3 yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang memiliki target sebesar 75%. Pada realisasinya, pencapaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat pada Triwulan IV 2020 baru mencapai 68,62%, hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga pemeriksa pada perwakilan, jadwal kegiatan yang harus dilakukan, dan ketidaktertiban pemerintah daerah dalam mendokumentasikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan pemerintah daerah terkait

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan, dan sosialisasi berkelanjutan mengenai kewajiban dan prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada entitas.

Strategi 4 Meningkatkan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Selama Tahun 2020, IKU ini telah mencapai target 100,78% karena telah terdapat beberapa pemeriksaan tematik yang dilaksanakan. Diharapkan agar kedepannya BPK Papua Barat dapat terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.

Strategi 5 Meningkatkan Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Pencapaian IKU 5 yaitu Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan sebesar 100% karena belum terdapat permintaan pemeriksaan baik dari Lembaga Perwakilan maupun IPH.

Strategi 6 Meningkatkan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Pencapaian IKU 6 yaitu Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sebesar 100% karena belum terdapat pemeriksaan tematik lokal.

Strategi 7 Meningkatkan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Belum tercapainya IKU 7 yaitu Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang memiliki target Sangat Memuaskan (5,00). Pada realisasinya, hasil pengukuran survei ini baru mencapai 4,51. Diharapkan pada tahun ke depannya, para pegawai semakin memahami visi, misi serta nilai-nilai dasar BPK.

Strategi 8 Meningkatkan Hasil Evaluasi AKIP

Pencapaian IKU 8 yaitu Hasil Evaluasi AKIP sebesar 87,04 melampaui target yang ditetapkan yaitu 86,00. Diharapkan agar kedepannya akuntabilitas kinerja di BPK Papua Barat semakin meningkat.

Strategi 9 Meningkatkan Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pencapaian IKU 9 tahun 2020 adalah 99,55%, telah melampaui target yang ditentukan, yakni 95%. Seluruh pegawai secara sadar dan optimal memanfaatkan fasilitas layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Sistem teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK, sehingga setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Strategi 10 Meningkatkan Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Belum tercapainya IKU 10 yaitu Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang memiliki target sebesar 100%. Selama Triwulan IV BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menerapkan Best Practice (BP) yaitu Integrasi Pelayanan Publik (Pelayanan PIK, Perpustakaan, Pelayanan SIPTL, Ruang Konsultasi dan Edukasi Publik) sehingga realisasi IKU ini adalah 25%. Diharapkan kedepannya penerapan manajemen pengetahuan di BPK Papua barat menjadi semakin lebih baik dan terdapat inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung penerapan manajemen pengetahuan. Di tahun-tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan mendorong pegawainya agar dapat memberikan proposal usulan *Best Practice* yang kelak nantinya dapat diterapkan secara universal di BPK.

Strategi 11 Meningkatkan Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Belum tercapainya IKU 11 yaitu Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi yang memiliki target Sangat Memuaskan (3.80). Pada realisasinya pencapaian IKU ini yaitu sebesar 3.71 belum memenuhi target yang ditentukan. Diharapkan agar kedepannya terdapat peningkatan kualitas komunikasi.

Strategi 12 Meningkatkan Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Belum tercapainya IKU 12 yaitu Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang memiliki target 100%. Pada realisasinya, pencapaian target pemenuhan jam diklat baru mencapai realisasi 94,57% dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang belum melaksanakan diklat selama tahun 2020. Untuk mengatasi kondisi ini, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berkomitmen membuat perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kewajiban pemenuhan jam diklat bagi pegawai dengan agenda kerja Sub Auditorat sehingga diharapkan setiap pemeriksa mampu memenuhi jam diklat untuk pengembangan karir dan kompetensi pemeriksa.

Strategi 13 Meningkatkan Tingkat Kinerja Anggaran

Capaian IKU 13 selama tahun 2020 adalah sebesar 90,88% telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 87%. Sasaran strategis dan IKU ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan ekonomis serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV PENUTUP

LAK BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat ini dibuat sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dinyatakan dalam 2 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja utama. Hal ini tertuan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan bersama Tortama KN VI, beserta target kinerja yang ingin dicapai.

Secara umum, BPK Perwakilan Papua Barat mengalami peningkatan dalam pencapaian skor kinerja yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Papua Barat pada tahun 2020 sebesar 94,43%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 97,51% atau mengalami penurunan skor kinerja sebesar 3,08%. Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam memenuhi target kinerja yang telah disepakati antara lain:

1. Keterbatasan tenaga pemeriksa maupun penunjang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya
2. Kesadaran dan ketertiban entitas dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan serangkaian upaya perbaikan yang akan dilakukan sehingga kinerja perwakilan pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh perwakilan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan beberapa informasi tambahan seperti kualitas penyelesaian pekerjaan, jadwal penyelesaian keluaran, dan jadwal diklat pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
2. Meningkatkan komunikasi dan kesadaran entitas untuk bersama-sama mendorong ketertiban pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diantaranya ketepatan penyampaian LKPD dan pmutakhiran data penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara
3. Memaksimalkan penerapan Manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat